



**STRUKTUR MASYARAKAT DAN Keadilan Sosial
(Perspektif Sosiologi Transformatif)**



**Universitas Indonesia
Perpustakaan**

Prof. Iwan Gardono Sujatmiko Ph.D.

**Pidato Pengukuhan
Guru Besar Sosiologi Politik
pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
di depan
Sidang Terbuka Universitas Indonesia
Depok, 10 Juni 2015**

Call Number	Pembelian/Hadiah Deposit
PEB 0303	Dari : FISIP Tgl. Terima : 6 Jan 2017

Struktur Masyarakat dan Keadilan Sosial (Perspektif Sosiologi Transformatif)

Yang terhormat,

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia

Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia serta Para Guru Besar Tamu

Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia

Dekan dan Wakil Dekan FISIP-Universitas Indonesia serta para Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Indonesia

Rekan Pengajar, alumni, mahasiswa serta Staf FISIP-UI, khususnya Departemen Sosiologi

Para hadirin dan handai taulan yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wa barakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih pada hadirin yang telah menghadiri acara ini yang merupakan akuntabilitas keilmuan saya sebagai seorang sosiolog dengan kekhususan Sosiologi Politik dalam menganalisis dan memberi masukan bagi transformasi masyarakat, khususnya Indonesia. Dalam perjalanannya saya sebagai sosiolog saya melihat bahwa perkembangan Sosiologi Indonesia—maupun di negara lain—telah menyumbang berbagai konsep, teori dan model untuk menganalisis dinamika masyarakat. Namun masih terdapat satu topik yang memerlukan perhatian yang lebih besar yakni masalah keadilan sosial yang sangat kompleks dan sekaligus mempunyai bobot normatif yang tinggi. Masalah keadilan sosial ini seringkali dilihat dalam konteks struktur masyarakat vertikal yang sering

menjadi fokus dari sosiologi dan melibatkan kelas sosial yang berada di lapisan atas, tengah dan bawah.¹ Selain itu keadilan juga dilihat pada institusi dasar masyarakat—politik, hukum, ekonomi, budaya—yang mengalokasikan hak, kesempatan dan sumberdaya.² Secara ringkas keadilan sosial berkaitan dengan *redistribusi*³ dan *akses* bagi kelas sosial di lapisan bawah ke *aset* politik, ekonomi, dan sosial.

Namun struktur vertikal ini menjadi lebih kompleks dengan adanya struktur keadilan horizontal yang mencakup agama, sukubangsa, jender yang berkaitan dengan akses untuk ekspresi simbol dan nilai. Demikian juga terdapat struktur regional pusat-daerah dan antar daerah dalam hal keseimbangan antara sentralisasi dan otonomi. Dinamika antar struktur vertikal, horizontal dan regional ini masih belum dikembangkan secara komprehensif.⁴ Selain itu dinamika sosial yang telah dijelaskan oleh berbagai studi masih memerlukan perspektif yang memberikan solusi dan rekomendasi yang memfokuskan pada transformasi sosial agar stratifikasi masyarakat lebih terbuka. Rekomendasi seperti ini perlu lebih dikembangkan karena keterbukaan stratifikasi sosial ini akan meningkatkan mobilitas vertikal yang dapat mendukung keadilan sosial. Masyarakat yang menjadi lebih demokratis dengan partisipasi politik yang tinggi dan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi masih belum lengkap jika tidak disertai dengan adanya mobilitas vertikal. Masyarakat ini masih merupakan masyarakat “semi-kasta” dan belum adil. Hal ini menjadi sangat relevan untuk Indonesia yang secara eksplisit telah mencantumkan keadilan sosial sebagai sila kelima dalam ideologi Pancasila. Dalam pidato pengukuhan ini saya akan membahas bagaimana kaitan antara struktur masyarakat dengan keadilan sosial disertai solusi dengan Perspektif Sosiologi Transformatif.

Realitas Ketidakadilan Sosial

Masalah mendasar yakni keadilan sosial yang telah dibahas oleh Aristotle yang mengkaitkannya dengan struktur masyarakat. Perdebatan mengenai hal ini masih berlangsung sampai kini—dan juga masa depan—dimana berbagai pemikiran dan disiplin ilmu mencoba untuk mengembangkannya sesuai dengan realitas keragaman dan sejarah

masyarakat masing masing. Pemikiran mengenai hal ini diperkaya juga dengan pemikiran agama yang melihat keadilan sosial sebagai salah satu hal yang penting. Pertanyaan seperti “Masyarakat seperti apakah yang dianggap adil?” telah menghasilkan beragam jawaban yang berbeda bahkan bertentangan. Berikut ini akan dibahas bagaimana kompleksitas keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia dan terlihat bahwa berbagai makna dan rasa ketidakadilan telah menghasilkan konflik sosial.

Realitas keadilan sosial mengalami evolusi dimana persepsi dan rasa keadilan masyarakat berubah dengan kesadaran baru yang seringkali dikonstruksi oleh para agen pembaharu sosial yang terdiri dari pemikir sosial dan para nabi. Demikian pula rasa keadilan ini diukur dengan indikator-indeks keadilan sosial yang juga berevolusi sehingga menjadi lebih tajam dalam melihat gejala tersebut. Ketidakadilan sosial secara vertikal yang terkenal adalah kasta dimana terjadi eksklusi dan eksploitasi kasta yang berada di paling bawah. Ketidakadilan sosial ini terjadi secara meluas dalam masyarakat dan dapat ditandai dari pola pemukiman dan pekerjaan namun kesadaran masyarakat seringkali mengabaikan dan menganggap hal tersebut sebagai kondisi yang biasa dan dapat diterima. Kesadaran umum tersebut merupakan hal yang normal dan menghegemoni sebagian besar masyarakat ini disebut sebagai *doxa* dimana ada yang mempertahankannya (*orthodoxa*) atau menentangnya (*heterodoxa*).⁵ Sebagai contoh, perbudakan di Yunani pada saat itu dianggap normal dan dilakukan juga oleh orang bijak. Berkaitan dengan hal ini maka ilmu pengetahuan dan agama mempunyai potensi untuk merekonstruksi pola pikir (*software*) masyarakat. Dalam hal ini perlu untuk lebih mempertajam analisis dan solusi gejala ketidakadilan dengan mengembangkan konsep, indikator-indeks dan kebijakan.

Mekanisme ketidakadilan Sosial

Mekanisme ketidakadilan sosial telah dijelaskan sebagai akibat dari adanya evolusi dan differensiasi masyarakat, pembagian kerja dan ketimpangan dalam kepemilikan pribadi.⁶ Ketidakadilan di Indonesia telah terjadi pada jaman sebelum Indonesia yakni kerajaan kerajaan di Nusantara dimana aspek keadilan sosial tidak menjadi perhatian bahkan diabaikan oleh

pihak yang berkuasa yang merupakan monarki absolut. Stratifikasi yang terbentuk piramid bersifat tertutup yang didasarkan kekuasaan politik disertai ekonomi. Sejalan dengan era tersebut peran dari agama dunia seperti Buddha, Hindu, Kristen dan Islam telah memperkaya pandangan masyarakat mengenai masalah duniawi dan supranatural.⁷ Dalam setiap agama tersebut telah muncul berbagai format keadilan sosial selain sistem kenegaraan dan ekonomi. Pada era kolonialisme—terutama Belanda—mulai tiba pemikiran format baru bentuk negara dan masyarakat serta keadilan sosial yang bersifat sekuler seperti republik, nasionalisme, komunisme, demokrasi, dan konstitusi. Namun di jaman kolonialisme Belanda berkembang mekanisme baru yang menghasilkan ketidakadilan sosial baru seperti tanam paksa, tanah partikelir serta perbudakan untuk mendukung kapitalisme. Ketidakadilan ini terlihat jelas dengan adanya stratifikasi sosial berbasis ras yang mirip kasta dengan orang Belanda/Eropa berada paling atas dan dibawahnya terdapat Timur Asing (Cina, Arab) dan pribumi di lapis terbawah.⁸

Upaya untuk menganalisis dan memberi solusi bagi masyarakat yang dicitakan dan keadilan sosial tidak dapat mengabaikan dimensi vertikal, horizontal, dan regional. Suatu analisis yang mencoba mengintegrasikan ketiganya telah dilakukan oleh Soekarno dalam Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme (1926).⁹ Soekarno mensinergikan Nasionalisme yang mencakup kesatuan Indonesia dengan Islamisme yang merupakan dimensi horizontal serta Marxisme yang menekankan dimensi vertikal untuk melawan kolonialisme Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, ketiga dimensi tersebut mempunyai format untuk membangun masyarakat termasuk meningkatkan keadilan sosial. Kelompok yang menekankan dimensi regional mencoba mencari keseimbangan perlunya membangun pusat yang kuat setelah adanya pendirian negara bagian. Kelompok horizontal membutuhkan ruang untuk ekspresi nilai dan simbol seperti yang dialami oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah maupun kelompok DI/TII. Demikian pula kelompok vertikal dengan PKI menekankan perubahan sosial yang revolusioner. Keadaan saat itu menunjukkan bahwa keadilan vertikal tidaklah mudah dicapai pada masyarakat yang kompleks seperti yang terjadi pada beberapa negara. Sebagai contoh, India mengalami perpecahan karena faktor

horizontal yakni agama dan selanjutnya Pakistan juga mengalami perpecahan karena faktor etnik dan geografi. Demikian pula Amerika Serikat mengalami perang saudara yang hebat antara pihak utara dan selatan. Selain itu perpecahan Uni Soviet menunjukkan bahwa faktor regional atau negara bagian serta faktor eksternal yakni *perang dingin* telah membuat negaranya runtuh.

Dalam perjalanan sejarah dinamika kelompok di ketiga dimensi tersebut menghasilkan konflik yang didasarkan pada konsepsi mereka masing-masing mengenai bentuk negara dan masyarakat yang dicita-citakan untuk mengisi kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan Soekarno dengan Pancasila mencoba untuk mendamaikan dan menyeimbangkan dimensi vertikal dengan regional dan horizontal yang mulai mengalami ketegangan dan konflik. Pada dimensi regional terjadi protes dan perlawanan dari PRRI dengan pusat di Sumatera Barat yang membentuk suatu pemerintah tandingan seperti juga dengan Permesta di Sulawesi Utara. Pada dimensi vertikal terdapat upaya Muso untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia dan dimensi horizontal terjadi konflik DI/TII di Jawa Barat yang diikuti oleh Aceh dan Kalimantan Selatan. Upaya untuk mengadakan sistem keadilan sosial menjadi sulit pada awal kemerdekaan karena perbedaan mengenai format negara atau kebijakan pemerintah Indonesia. Perubahan dari pemerintah kolonial ke negara baru yaitu Republik Indonesia telah menghasilkan *Integrative Revolution* dimana berbagai golongan dalam masyarakat berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan sehingga menghasilkan konflik.¹⁰

Menjelang tahun 1965 terdapat upaya radikal yang membangun situasi yang revolusioner oleh PKI. Strategi PKI tidak hanya meningkatkan mobilitas vertikal di strata bawah yakni buruh dan petani melainkan mengubah stratifikasi masyarakat dan bentuk negara. Strategi konfliktual PKI berskala nasional menghasilkan polarisasi antara PKI dan Non-PKI, antar kelas, misalnya penggarap, buruh tani dengan petani pemilik serta buruh pabrik dengan pemilik pabrik. Upaya PKI memonopoli kekuasaan ini gagal dan terjadilah konflik yang menghancurkan PKI. Saat itu sebenarnya Soekarno mencoba untuk menjaga keseimbangan dengan format Nasakom namun

gagal karena resistensi non PKI terhadap PKI yang mencoba memonopoli kekuasaan di ketiga dimensi tersebut.

Keberadaan partai komunis berupaya untuk menguasai dan memonopoli kekuasaan sesuai dengan teori Lenin mengenai revolusi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 1918 sampai 1987 partai komunis melakukan kudeta di 75 negara, negara bagian, pulau dan kota dimana berhasil di 28 negara.¹¹ Namun upaya revolusioner ini tidak semuanya berhasil dan faktor pendukungnya adalah: *pertama*, apakah ada dukungan eksternal (teori domino) seperti kasus Uni Soviet di Eropa Timur dan RRC di kawasan Asia Timur (Korea Utara, Vietnam; Kamboja, Laos). *Kedua*, apakah ada basis sosial non komunis yang kuat seperti kelompok agama (Katolik, Islam); dan *ketiga*, peran pemimpin yang mendukung partai komunis.¹²

Transformasi menuju Keadilan Sosial

Selain kompleksitas dimensi vertikal, horizontal dan regional, maka institusi politik, ekonomi dan sosial juga mengalami tuntutan setelah kemerdekaan. Pada negara Eropa yang telah maju tuntutan hak hukum, politik dan sosio-ekonomi telah dicicil selama ratusan tahun dengan beragam sumber daya termasuk perbudakan dan kolonialisme. Pada awalnya pembangunan ekonomi telah berjalan tanpa demokrasi dan pelayanan publik oleh negara kesejahteraan.

Ketidakadilan telah menghasilkan mekanisme untuk mencapai keadilan dan terdapat dua pola besar untuk melakukan inklusi yakni model kelas sosial di (bekas) negara2 komunis dengan pendekatan revolusi dan model inklusi Kewarganegaraan (*Citizenship*) secara evolusioner dengan negara kesejahteraan. Model inklusi kewarganegaraan yang dilakukan oleh negara Eropa seperti Jerman, Inggris, ini dianggap merupakan strategi untuk mengatasi pengaruh model kelas sosial dan komunisme.¹³ Dalam model negara komunis, inklusi golongan di lapisan bawah seperti petani dan buruh dilakukan melalui partai komunis yang memonopoli kekuasaan setelah terjadinya revolusi sosial. Redistribusi dilakukan disemua institusi politik,

ekonomi dan sosial. Partai komunis menekan kebebasan berpolitik dan ekspresi identitas kelompok namun memberikan jaminan sosial dalam kesehatan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. Namun sistem ini mulai runtuh sejak 1989 kecuali di beberapa negara yakni Tiongkok, Vietnam, Laos, Kamboja, Korea Utara dan Cuba. Kecuali Korea Utara negara yang lainnya telah membuka diri sistem ekonominya. Sementara itu model inklusi warganegara dilakukan secara bertahap yakni pengakuan hak hak hukum pada abad 18, politik pada abad 19 dan sosial ekonomi pada abad 20. Inklusi hukum dilaksanakan dengan diberikannya hak hukum, sementara inklusi politik ditandai dengan pemberian hak politik seperti dalam pemilu, dan hak sosial ekonomi ini dilakukan melalui negara kesejahteraan.¹⁴

Dalam kasus Indonesia, model inklusi untuk memberikan akses dan redistribusi pada kelas sosial di lapisan bawah telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan beragam format seperti Sosialisme Islam, Komunisme, Sosialisme, Marhaenisme, Murbaisme, dan Pancasila. Menjelang kemerdekaan Soekarno mengusulkan Pancasila untuk menginklusi semua pihak yang berada di struktur vertikal, horizontal dan regional melalui sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Sementara itu sila keempat dan kelima menunjukkan adanya proses inklusi vertikal agar Indonesia semakin demokratis dan adil. Sejak kemerdekaan, Pancasila dan sila kelima atau Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah dicoba diterapkan dengan berbagai cara. Penguasaan aset negara bekas Belanda dilakukan oleh perusahaan negara dan upaya pelayanan publik telah dimulai walaupun mendapat hambatan karena adanya ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh jatuh bangunnya parlemen.

Pada era Suharto terdapat model Trilogi Pembangunan yang mengintegrasikan Stabilitas Politik, Pertumbuhan dan Pemerataan. Selain itu terdapat pula 8 Jalur Pemerataan (Kebutuhan Pokok, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, Pembagian Pendapatan, Kesempatan Kerja, Berusaha, Berpartisipasi dalam Pembangunan, Penyebaran Pembangunan, Keadilan). Kebijakan ini meningkatkan akses pelayanan sosial dan ekonomi. Sejak era reformasi pelayanan sosial meningkat dengan adanya BPJS namun keadilan sosial yakni redistribusi aset ekonomi pada warga masih belum signifikan.

Walaupun demikian akses ke politik menjadi lebih terbuka baik di pusat maupun daerah dan politik pada dimensi horizontal lebih memberi ruang untuk ekspresi nilai dan simbol.

Mobilitas dan Inklusi Sosial

Pada saat ini masalah mobilitas vertikal dan inklusi simbol dari warga di lapisan bawah masih belum signifikan. Demikian juga kebijakan dan program mobilitas vertikal masih sangat terbatas. Pada struktur vertikal masyarakat Indonesia terlihat bahwa bentuknya masih seperti piramid dimana sekitar 60%-70% berada dilapisan bawah:

Tabel 1: Persentase Penduduk menurut Golongan Rumah Tangga¹⁵

No	GOLONGAN RUMAH TANGGA	JUMLAH PENDUDUK (%)	
		1975	2005
1	Buruh tani	11.7	13.5
2	Petani Gurem (≤ 0.5 ha)	22.2	17.7
3	Pengusaha Pertanian (0.5 – 1 ha)	12.0	6.6
4	Pengusaha Pertanian (> 1 ha)	13.7	4.6
5	Bukan Pertanian Golongan Rendah di desa	14.7	15.8
6	Bukan Angkatan Kerja di desa	3.0	4.8
7	Bukan Pertanian Golongan Atas di desa	6.0	6.9
8	Bukan Pertanian Golongan Rendah di kota	9.2	16.0
9	Bukan Angkatan Kerja di kota	1.5	5.4
10	Bukan Pertanian Golongan Atas di kota	6.1	8.9

Sumber: Biro Pusat Statistik: *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2005* (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 2005): 76.

Apakah stratifikasi masyarakat Indonesia cukup terbuka artinya seseorang dapat mengalami mobilitas vertikal dari lapisan bawah ke tengah? Atau apakah seorang anak di lapisan bawah dapat naik ke tengah atau atas? Sebuah studi di Jakarta menunjukkan bahwa seorang anak di lapisan bawah-bawah atau pekerjaan ayahnya adalah tukang kemungkinannya untuk mencapai lapisan tengah-atas (profesional dan manajer) adalah sepertujuh

dibandingkan dengan seorang anak yang berasal dari lapisan tengah-atas.¹⁶ Studi lainnya menunjukkan bahwa stabilitas posisi atau ketertutupan sosial di kota-kota di Jawa Barat dan Jawa Timur cukup tinggi karena 86.4% anak yang berada di lapisan bawah akan mewarisi pekerjaan ayahnya.¹⁷ Salah satu cara untuk mobilitas vertikal bagi seorang anak di lapisan bawah adalah melalui pendidikan tinggi yang dapat menjadi eskalator sosial ke lapisan menengah atas. Namun suatu studi menunjukkan dari 40% rumah tangga dengan pendapatan terbawah yang anaknya di perguruan tinggi hanya 2.67% sementara 20% rumah tangga berpendapatan tertinggi anaknya yang berada di perguruan tinggi adalah 33.9%.¹⁸

Untuk mengatasi ketertutupan sosial diperlukan proteksi bagi anak-anak di lapisan bawah dalam bentuk kuota di perguruan tinggi. Pada saat ini telah ada Program Bea Siswa Bidik Misi yang diberikan pada keluarga yang tidak mampu untuk kuliah di perguruan tinggi. Namun program ini perlu diperluas kepada mereka yang berada di 40% terbawah dan kutanya bukan hanya pada perguruan tinggi namun mulai dari SD, SMP dan SMA sehingga mereka yang berbakat dapat terbantu dari kecil sampai dengan universitas.

Selain itu proteksi pada warga yang berada di lapisan bawah dapat dilakukan dengan program kepemilikan saham (ESOP) sehingga membantu mereka masuk ke lapisan di atasnya. Pola ini pernah Pola NTUC di Singapura menunjukkan bahwa serikat buruh dapat menjalankan usaha yang membantu kualitas hidup mereka. Selain itu dengan pola ini akan meningkatkan kemungkinan anak buruh untuk naik ke lapisan di atasnya. Demikian juga untuk daerah yang kaya sumber daya alamnya (hutan dan tambang) sebenarnya komunitas sekitarnya berhak mendapat manfaat melalui BUMDesa atau Koperasi Komunitas. Selama ini pemberian konsesi Hutan (HPH) dan Tambang (IUP) seringkali hanya dimonopoli oleh perusahaan dan tidak melibatkan atau menginklusi kelompok warga di sekitar hutan dan tambang. Usaha ekonomi bersama tidak terjadi dan hal ini akan meningkatkan kesenjangan dan ketidakadilan bahkan konflik sosial.¹⁹

Selain itu untuk lebih mendukung keberadaan buruh dan petani maupun sektor UKM perlu lebih didukung dan diinklusi dan dicantumkan di konstitusi (UUD NRI 1945) yang dapat dilakukan dengan tiga cara yakni:²⁰

1. Inklusi Politik: dalam model ini golongan tertentu dicantumkan dalam konstitusi atau diinklusi oleh partai politik. Di Indonesia pernah terdapat model Kuota dalam lembaga politik parlemen seperti jatah bagi golongan kecil yakni Cina (9 kursi), Arab (6 kursi) dan Eropa (3 kursi) dalam Konstitusi RIS dan Sementara. Selain itu model pemberian kuota bagi golongan besar yakni buruh dan petani (masing masing 15%) dalam KNIP oleh Presiden pada tahun 1946.

2. Inklusi Ekonomi: Pola Pencantuman dimana mereka disebut sebagai golongan golongan yang perlu diperhatikan seperti dalam Konstitusi Filipina (1987) tanpa menjelaskan secara rinci kuota untuk mereka dalam bidang politik atau ekonomi. Salah satu ayat dalam konstitusi Filipina menunjukkan bagaimana buruh mendapat dukungan dari negara: *"The State affirms labor as a primary social economic force. It shall protect the rights of workers and promote their welfare."*

3. Inklusi Sosial: Pola pencantuman dalam konstitusi seperti dalam berbagai konstitusi yang sosiologis yakni dimana berbagai golongan telah dicantumkan dan diakui dalam konstitusi. Sebagai contoh 73% konstitusi mencantumkan kata "buruh" dan "perempuan" 50%. Pencantuman yang disertai dengan kuota secara tegas terdapat di Konstitusi India dan Malaysia. India mencantumkan kuota secara proporsional untuk bidang pendidikan (universitas), birokrasi dan parlemen.

Inklusi Dalam Masyarakat

Rekomendasi Inklusi Sosial bagi golongan mayoritas di UUD ini perlu diperluas dimana prinsip prinsip inklusi dan keterwakilan sosial perlu diterapkan dalam masyarakat. Sebagai contoh prinsip inklusi dapat diterapkan dalam berbagai UU dan Perda. Selain itu, pihak masyarakat perlu melakukan inisiatif menerapkan inklusi sosial dalam berbagai AD-ART organisasi mereka. Sebagai contoh, parpol dan ormas perlu mengamandemen AD-ART atau

"konstitusi" mereka sehingga memberi perhatian dan kesempatan bagi anggota organisasi mereka yang berasal dari golongan di lapisan bawah (petani, buruh, sektor informal).

Perspektif Sosiologi Transformatif

Perdebatan mengenai keadilan sosial ini telah menghasilkan berbagai pandangan subyektif yang beragam karena membahas apa yang dianggap "baik" atau "buruk." Subyek analisis ini merupakan masyarakat yang dianalisis oleh ilmu kemasyarakatan dan humaniora yang berbeda dengan obyek studi ilmu pengetahuan alam. Penjelasan dan penafsiran serta konstruksi realitas masyarakat tersebut sangat kompleks dimana peran faktor geografi, budaya, institusi sosial, serta pemimpinya telah menghasilkan keunikan keunikan sehingga tidak mudah untuk dilakukan generalisasi.

Namun terlepas dari perbedaan dalam aspek ontologi, epistemologi, maupun axiologi, masalah keadilan sosial yang normatif ini telah menjadi fokus ilmu sosial dan humaniora. Seringkali berbagai studi ilmu sosial dan sosiologi hanya membahas deskripsi dan eksplanasi suatu gejala tanpa diikuti dengan solusi atau rekomendasi kebijakan. Sebagai perbandingan studi dalam ilmu politik pada saat ini semakin memberi perhatian pada solusi yakni "demokratisasi" yang dapat berupa berbagai usulan seperti perubahan sistem pemilu (distrik atau proporsional), pemerintahan (presidensial atau parlemen). Dalam hal ini "demokratisasi" telah dianggap "universal" dan berlaku di setiap negara yang akan mencapai kemajuan dalam bidang politik. Sosiologi yang mencakup beragam teori, perspektif dan fokus baik pada tingkat mikro, meso maupun makro masalah keadilan sosial perlu mendapat perhatian lebih besar karena sangat kuat kaitannya dengan kualitas kemasyarakatan dan kemanusiaan. Tentu terdapat berbagai pihak yang tidak setuju dengan pentingnya keadilan sosial maupun demokrasi, namun para ilmuwan sosial dan kemanusiaan telah dituntut untuk semakin mengembangkan konsep, indikator, teori dan model yang relevan dan sensitif pada keragaman masyarakat. Sosiologi diharapkan dapat berfungsi dalam bidang akademik (*professional*), kebijakan (*policy*), kritis (*critical*) dan publik (*public*).²¹

Sosiologi seperti apa yang dapat lebih memperkaya analisis sosiologi dan sosiolog sehingga menawarkan solusi, selain deskripsi dan eksplanasi suatu masalah. Berkaitan dengan hal ini perlu dikembangkan Perspektif Sosiologi Transformatif yang membahas bukan hanya analisis deskriptif dan eksplanatif melainkan memberi solusi agar terjadi transformasi sosial, khususnya keterbukaan stratifikasi masyarakat. Dalam proses ini para warga yang berada di strata bawah (petani, pekerja, sektor informal) dapat naik ke strata tengah dan atas. Proses ini merupakan salah satu aspek Keadilan Sosial sehingga mencegah masyarakat "semi-kasta."

Dengan demikian, analisis dan kebijakan berbagai gejala sosial di Indonesia seperti demokratisasi, amandemen konstitusi, ideologi, desentralisasi, dan pembangunan komunitas perlu dilihat sejauhmana dapat mengadilkan masyarakat atau meningkatkan keterbukaan stratifikasi. Jika keadilan telah tercapai maka hubungan sosial dasar (*Basic social relation*) dalam masyarakat akan menjadi baik karena: *pertama*, terjadinya *trust*, kohesi dan solidaritas serta rendahnya iri dan cemburu sosial antar kelompok vertikal dan juga horizontal dan regional; *kedua*, berlakunya kompetisi (nasional dan global) politik, ekonomi dan budaya yang *fair* karena telah ada rasa saling percaya (*trust*); *ketiga*, terjadinya konflik yang realistik sebagai sarana untuk melakukan koreksi (misalnya melalui pengadilan) dan transformasi hubungan sosial (kebijakan publik). Proses yang terjadi pada ketiga bidang hubungan sosial dasar ini akan menjadi modal dalam perjalanan masyarakat Indonesia kedepan. Berikut ini akan dibahas bagaimana Perspektif Sosiologi Transformatif dapat membantu berbagai studi untuk lebih meningkatkan keadilan sosial.

Studi Stratifikasi yang Transformatif ²²

Salah satu bidang yang menjadi kekhususan sosiologi adalah stratifikasi atau anatomi masyarakat secara vertikal dimana terjadi lapisan2 atas (atas-atas, atas-bawah); tengah (tengah-atas, tengah bawah) dan bawah (bawah-atas dan bawah-bawah). Selama ini studi studi stratifikasi dan mobilitas sosial seringkali hanya terbatas pada deskripsi (dengan indikator status sosial ekonomi, baik yang obyektif, subyektif, atau reputasional) dan

eksplanasi dengan teori-teori. Namun analisis stratifikasi ini hanya sampai pada eksplanasi dan tidak disertai dengan solusi bagaimana agar stratifikasi menjadi lebih terbuka, misalnya dengan kuota bagi golongan yang berada di strata bawah atau revisi dan amandemen UUD dan peraturan lainnya. Dengan kata lain analisis stratifikasi masih terbatas pada aspek deskriptif dan eksplanatif namun belum solusi atau transformatif dimana stratifikasi akan diubah menjadi lebih terbuka agar masyarakat menjadi lebih adil.

Konstitusi yang Transformatif²³

Konstitusi yang transformatif berarti konstitusi yang mendukung perubahan sosial seperti pemberian kuota untuk golongan yang lemah agar mengalami mobilitas vertikal. Pada awalnya konstitusi berfungsi untuk membatasi monarki absolut yang diubah menjadi monarki konstitusional. Selain itu konstitusi juga berfungsi melindungi negara beserta semua haknya. Pada awalnya konstitusi lebih bersifat politik (membahas supra struktur seperti negara, pemilu dan melindungi HAM Warganegara) dan selanjutnya diikuti dengan konstitusi ekonomi yang membahas masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun konstitusi juga dapat mengubah masyarakat yakni menjadi konstitusi yang transformatif dan memberi kuota dan kesempatan pada warga di lapisan bawah untuk mengalami mobilitas vertikal. Konstitusi India memberi kuota pada kasta Paria, kelas terbawah dan suku terasing serta kelas2 terbelakang lainnya. Demikian juga konstitusi Malaysia yang memberi perlindungan pada golongan bumi putera dan orang asli (Sabah dan Serawak). Sejauh ini keempat amandemen UUD 1945 masih lebih bersifat restriktif yakni membatasi kekuasaan presiden dan protektif terhadap Hak Asasi Manusia.

Demokrasi yang Transformatif²⁴

Sosiologi transformatif melihat bahwa produk dan proses demokratisasi dapat mengubah struktur masyarakat menjadi lebih inklusif dan representatif secara vertikal. Demokrasi memang merupakan suatu tujuan tersendiri dimana masalah politik menjadi lebih beradab baik dalam pemilihan wakil rakyat dan pemimpin maupun dalam pembuatan kebijakan.

Pada masa lalu masyarakat melakukan proses ini dengan kekerasan (*bullet*) yang diganti dengan *ballot boxes*. Demokrasi seringkali dikaitkan dengan *checks and balances* atau mekanisme koreksi atau “demokrasi korektif” sehingga keadaan menjadi seimbang lagi. Namun demokrasi juga dapat merupakan faktor yang dapat mengubah struktur masyarakat dengan berbagai kebijakan sehingga stratifikasi menjadi lebih terbuka. Perspektif Sosiologi Transformatif mengharapkan terjadinya Demokrasi Transformatif, bukan hanya Demokrasi Korektif. Berbagai kebijakan politik (UUD, UU, Perda dll) diharapkan akan menghasilkan transformasi sosial, bukan hanya keteraturan politik (*political order*). Pada masyarakat berkembang (dengan pola piramid dimana mayoritas berada di strata bawah) keterbukaan stratifikasi sangat sulit sementara dalam masyarakat maju (belah ketupat dengan mayoritas di strata tengah dan atas) saluran pendidikan dan pekerjaan yang tersedia dengan cukup.

Desentralisasi yang Transformatif ²⁵

Sosiologi transformatif juga dapat membantu melihat dan memperbaiki proses desentralisasi yang seringkali diartikan sebagai “transfer kekuasaan-kewenangan” dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Proses ini dilihat sebagai dua pihak yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah padahal ada masyarakat lokal sebagai pihak ketiga yang perlu mendapatkan perhatian. Jika penekanan pada transfer kekuasaan-kewenangan pada pemda maka hal ini akan menghasilkan surplus kekuasaan-kewenangan seperti sejak Otonomi Daerah. Pemda sebenarnya telah mendapat kekuasaan-kewenangan yang besar pada era Orde Baru. Penambahan kekuasaan ini akan membuat pemda semakin berkuasa dan meningkatkan jarak mereka dengan masyarakat lokal. Seharusnya desentralisasi merupakan proses pemberian kekuasaan dan kewenangan pada masyarakat juga sehingga dapat mengimbangi pemda yang diperkuat. Pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan dengan menambah kekuasaan masyarakat dengan hak keterbukaan informasi publik yang menuntut transparansi penyelenggaraan pemda (*e-budgeting, e-procurement*). Dengan kata lain proses ini akan memberdayakan masyarakat sekaligus mengurangi kekuasaan (*disempowerment*) pemda. Desentralisasi kita berlaku sejak tahun 2001 namun UU KIP baru ada pada

tahun 2010 demikian juga UU Desa pada 2015. Pemberdayaan masyarakat dilakukan di Bolivia bersamaan dengan diberlakukannya desentralisasi atau penguatan pemda.

Ideologi Pancasila yang Transformatif²⁶

Ideologi dapat digunakan untuk mendukung *status quo* atau melakukan transformasi sosial. Salah satu caranya adalah dengan membuat indikator untuk mengoperasionalkan ideologi sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan ideologi di masyarakat. Kelima sila ini dapat dilihat masing-masing berada dalam satu kontinum yang meningkat derajatnya. Dengan kata lain, Pancasila mempunyai potensi untuk melakukan transformasi agar keberadaan ke 5 sila tersebut semakin membaik. Dalam hal ini sila kelima menjadi sangat relevan dengan sosiologi transformatif karena mendukung masyarakat yang semakin adil dan dalam hal ini ditandai dengan stratifikasi yang lebih terbuka.

5.1. Pembangunan Komunitas yang Transformatif²⁷

Pembangunan komunitas (*community development*) yang berada disekitar tambang minerba seringkali hanya terbatas pada pemberian fasilitas kesehatan, pendidikan, pemukiman atau *development in the community*. Seharusnya sumber daya alam ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan transformasi sosial (*development of the community*) dimana komunitas sekitar tambang mendapatkan saham (misalnya 10% sd 20%) melalui BUMDes atau Koperasi Komunitas. Dengan Pembangunan Komunitas yang transformatif ini maka komunitas akan naik kelas dari non-pemilik menjadi pemilik saham. Dalam hal ini kapitalisme mejadi lebih inklusif, bukan hanya terbatas pada swasta (dalam negeri dan asing) dan negara saja (BUMN/D). Adanya penambahan hasil dari saham ini dapat membantu warga untuk melakukan mobilitas sosial vertikal.

Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, studi Sosiologi Indonesia perlu lebih meningkatkan fokusnya pada masalah keadilan sosial yang sangat relevan secara empirik dan ideologis. Studi sosiologis mengenai keadilan sosial perlu dilakukan diberbagai daerah dan kelompok untuk melihat variasi gejala tersebut.

Kedua, struktur masyarakat Indonesia yang berbentuk piramid sulit untuk mendukung mobilitas vertikal keatas yang merupakan ciri keadilan sosial yang penting. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan proteksi berupa kuota dilembaga pendidikan.

Ketiga, peran agen perubahan sosial baik di negara dan masyarakat seperti ormas mempunyai peran penting dalam melaksanakan kebijakan keadilan sosial.

Keempat, keberadaan ideologi mengenai keadilan sosial sangat mendukung pelaksanaan keadilan sosial namun perlu pembumian antara lain dengan menggunakan indeks-indikator agar lebih operasional sehingga diketahui sejauhmana sila tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat..

Kelima, keadilan sosial berkaitan dengan redistribusi akses dan aset sehingga seringkali mendapat tentangan.

Keenam, Perspektif Sosiologi Transformatif yang fokus pada mobilitas vertikal dan keterbukaan stratifikasi mempunyai potensi untuk meningkatkan keadilan sosial.

¹ Kelas sosial disini merujuk pada golongan okupasi, lihat Erickson, R. and Goldthorpe, J.H. 1993. *The Constant Flux*. Oxford: Clarendon Press.

² Lihat pembahasan Brian Barry tentang teori Rawls dalam 2006. *Why Social Justice Matters*. Cambridge: Polity Press. 16-17 dan John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, Mass: Harvard University Press; Oxford: calrendon Press.

³ Konsep redistribusi ini dibahas oleh Aristotle dan para pemikir sosial, lihat Wolfgang Merkel & Heiko Giebler. 2009. "Measuring Social Justice and Sustainable governanca in the OECD" dalam *Sustainable Governance Indicators 2009: Policy Performance and Executive Capacity in the OECD*. Bertelsmann Stiftung (ed.). Gutersloh,187-215.

⁴ Aspek geometri dalam analisis masyarakat atau *social geometry* dikembangkan oleh Georg Simmel. 1971. *On Individuality and Social Forms: Selected Writings*. Edited and

with an Introduction by Donald N. Levine. Chicago: The University of Chicago Press, 143-213. Pembahasan vertikal, horizontal dan regional ini dibahas dalam Iwan Gardono Sujatmiko. 2006. "Keadilan Sosial dalam Masyarakat Indonesia" dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Depok: FISIP Universitas Indonesia, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Brighten Institute, Kelompok Tempo Media, 216-241.

⁵ Bourdieu, Pierre. 1977 [1972]. *Outline of a Theory of Practice*. R. Nice, transl. Volume 16. Cambridge: Cambridge University Press, 164, 167, 169.

⁶ Lihat R. Dahrendorf. 1969. "On the Origin of Inequality among Men" in *Social Inequality: Selected Readings*. Andre Beteille (Ed.). England: Penguin Books, 16-63.

⁷ Analisis yang mendalam mengenai Jawa dilakukan oleh Denys Lombard dalam 3 jilid bukunya Nusa Jawa: Silang Budaya, Gramedia Pustaka Utama terbit tahun 1995 (jilid 1) dan 2005 (jilid 2 dan 3)

⁸ W.F. Wertheim. 1956. *Indonesian Society in Transtition: A Study of Social Change*. Bandung: W. Vanhoeve Ltd, 139-140.

⁹ Lihat, Sukarno. 1964. "Nasionalisme, Islamisme, Marxisme," *Dibawah Bendera Revolusi*. Jilid 1. Panitia, 1-23.

¹⁰ Lihat Clifford Geertz. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, Ch. X.

¹¹ Studi ini dilakukan oleh Nahin dan dikutip dalam buku D.S. Moeljanto & Taufiq Ismail. 2008. *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI Dkk*. Jakarta: IPS, XV.

¹² Lihat A. Doak Barnett(Ed.).1964. *Communist Strategies in Asia: A Comparative Analysis of Governments and Parties*. New York, Frederick A. Praeger.

¹³ Lihat T.H. Marshall. 1985. "Citizenship and Social Class." *States and Societies*. David Held et.al. Oxford: Basic Blackwell, 248-260.

¹⁴ Barbalet.J.M. 1988. *Citizenship: Rights, Struggle and Class Inequality*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

¹⁵ Biro Pusat Statistik: 2005. *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2005* (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 2005)

¹⁶ Sujatmiko, Iwan Gardono. 1996. "Stratifikasi dan Mobilitas Sosial: Suatu Studi Awal Masyarakat Jakarta". *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 89.

¹⁷ Lihat Indera Ratna Irawati Pattinasarany. 2012. "Mobilitas Social Kelas Menengah: Telaah Masyarakat Kota Jawa Barat dan Jawa Tengah" *Prisma*, Vol. 31, No. 1, 35.

¹⁸ Wicaksono, Teguh Yudo & Deni Friawan. 2008. "Recent Development of Higher Education in Indonesia: Issues and Challenges." *Eaber Working Paper Series*. Paper no. 45.

¹⁹ Iwan GardonoSujatmiko. "Konflik dan Keadilan Sosial," *Kompas*, 2 Maret 2012

²⁰ Bagian ini didasarkan pada Iwan Gardono Sujatmiko, Ganda Upaya, Adrianus Jebatu, Khairullah. 2015. *Amandemen Konstitusi, Representasi Sosial dan Keadilan Sosial*.

²¹ Michael Burrawoy. 2005. "For Public Sociology." *American Sociological Review*. Vol. 70. (Februari 4-28).

²² Iwan Gardono Sujatmiko. 1996. "Stratifikasi dan Mobilitas Sosial: Suatu Studi Awal Masyarakat Jakarta," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, No.1.

²³ Iwan Gardono Sujatmiko. 2007. "Constitution And Social Transformation: Constitutional Amendments In The Post-Suharto Indonesia." The 23rd IVR World Congress of Legal and Social Philosophy, Krakow, Poland. August 4. Iwan Gardono Sujatmiko, Ganda Upaya, Adrianus Jebatu, Khairullah. 2015. *Amandemen Konstitusi, Representasi Sosial dan Keadilan Sosial*. Iwan Gardono Sujatmiko. 2004. "Konstitusi dan Transformasi Sosial. *Suara Pembaruan*, 18 September.

²⁴ Iwan Gardono Sujatmiko. 2009. "Warga Negara, Pemilu, dan Demokrasi Transformatif" *Kompas* 9 Juli. Iwan Gardono Sujatmiko. 1993. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIP): "Demokrasi Sosial dan Masyarakat Indonesia," Seminar "Demokrasi di Indonesia" LIPI, Jakarta 24 Mei.

²⁵ Iwan Gardono Sujatmiko & Hari Nugroho. 2015. "Re-examining Indonesia Decentralization," *Decentralization and the Inclusion of the Marginalized Groups*. Iwan Gardono Sujatmiko & Hari Nugroho. (Ed.) Jakarta. Iwan Gardono Sujatmiko. 2004. "Konstitusi dan Transformasi Sosial. *Suara Pembaruan*, 18 September.

²⁶ Iwan Gardono Sujatmiko. 2011. "Pancasila yang Transformatif," *Kompas*, 8 Juni.

²⁷ Iwan Gardono Sujatmiko. 2010. "Pemetaan Subyek dan kegiatan Community Development."

UCAPAN TERIMA KASIH

Para hadirin yang terhormat,

Pada bagian akhir pidato ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak di Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia yang telah membantu terlaksananya acara pengukuhan saya sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Saya berterima kasih kepada seluruh guru guru saya di TK, SD, SMP, SMA. Demikian pula ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen dosen serta senior saya di FISIP-UI yakni Prof. Selo Soemardjan, Prof. Miriam Budiarjo, Prof T.O. Ihromi, Dr. Mely G. Tan, Soelaeman Soemardi MA, Prof. Juwono Sudarsono, Dra. Suryanti Suryochondro, Dra Anidal Hasyir MSi, Prof. Kamanto Sunarto, Prof. Robert Lawang.

Dalam kerjasama kegiatan di departemen Sosiologi perkuliahan saya berterima kasih kepada Prof. Paulus Wirutomo, Dr. Tamrin Amal Tomagola, Prof. Gumilar Somantri, Prof. Rohman Achwan, Prof. Sudarsono Hardjosoekarto, Prof. Dody Prayogo, Dr. Linda Darmayanti, Dr. Meuthia Gani Rachman, Dr. Hanneman Samuel, Dr. Imam B.Prasojo, Dr. Raphaela Dwianto, Dr. Erna Karim, Dr. Rosa Diniari, Ganda Upaya MA, Siti Hidayati MA, Evelyn Sulemaman MA, J.F. Waouw MA, Noeke Mangundipuro MA, Dr. Francisia Seda, Dr. Lugin Satyawati, Dr. Ira Pattinasarany, Dr. Ida Ruwaida, Dr. Seto Hardjana, Kusharyaningsih MA, Sri Sulastri MSi, Santy Novriaty MSi, Daisy Indira Yasmin MA, Hari Nugroho MA, Andi Rahman MSi, Diatyka Widya MA, Sakti Wira Yudha MSi, Drs. Anwar.

Dalam berbagai kegiatan penelitian selama di departemen Sosiologi saya berterima kasih atas kerjasama dari Ganda Upaya MA, Adrianus Jebatu MSi, Khairullah MSi, Roy Ferdy MTI, Satiti Shakuntala MSi, almarhum Rizal Hikmat MSi, dan Drs Subuh Prabowo. Demikian juga terima kasih saya sampaikan pada staf di departemen sosiologi yakni Usman, Endah Rahayu, Henny, Agus, Adek, Ryanto, Tuti, Marudin.

Dalam pengembangan departemen sosiologi dan FISIP UI saya berterima kasih pada Dr. Arie S. Soesilo, Prof. Dody Prayogo, Sulastiawan MA, Erwin Indrajaya MSi, serta almarhum M. Iqbal Jayadi MSi. Saya berterima kasih atas rekan diskusi mengenai sosiologi dan masalah masalah strategis pada Drs. Fritz Simanjuntak serta Adisanto Tuhatu MA. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar Angkatan 76 FISIP UI.

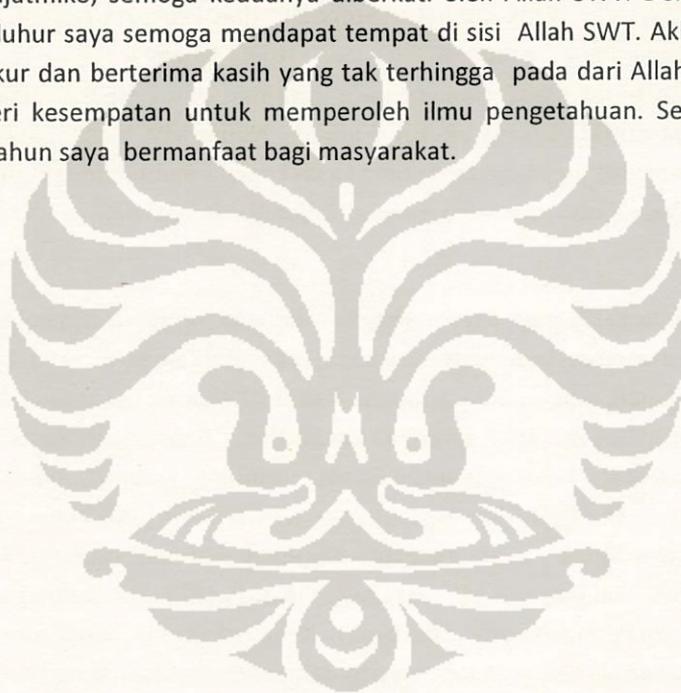
Ucapan terima kasih saya sampaikan juga pada para dosen dosen di Harvard University, serta pembimbing disertasi : Prof. Theda Skocpol, Prof. Andrew G. Walder, Prof. John L. Campbell dan Prof. Harrison C. White sebagai pembimbing akademis. Dalam riset lapangan disertasi saya mengucapkan terima kasih kepada para informan dan berbagai pihak yang telah membantu, khususnya Ketut Sudhana Astika MSi, dosen Universitas Udayana. Demikian juga saya berterima kasih kepada pembimbing skripsi saya Sutjipto Wirosardjono MSc dan kepada keluarga Bapak dan Ibu Ridwan di Puncu, Kediri.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar saya dari Jawa Barat: Keluarga besar Soeria Danoe Ningrat (Keluarga besar Dr Ishak Soeriakoesoemah, Keluarga besar Bapak Gandhi, Keluarga besar Ibu Gandhini, Keluarga besar Bapak Kadar Satari, Keluarga besar Bapak Sufri Yusuf, Keluar besar Ibu Garmita, Keluarga besar Bapak Gumbira, Keluarga besar Bapak Gandasumaryana). Demikian juga ucapan terima kasih dari keluarga besar saya dari Jawa Timur: Keluarga Prof. Bambang Rahino, keluarga Achmad Koentjoro SH, Keluarga Prof. Setiawan Kusdarto serta keluarga besar almarhum Bapak Sutarmadi (Surabaya), Keluarga besar almarhum Bapak Sungkono (Jakarta), Keluarga Dr. Sunarto dan Keluarga besar almarhum Bapak Diposuwiryo (Bojonegoro).

Saya juga berterima kasih kepada para sahabat keluarga besar kami yakni Bapak dan Ibu Sutadi Sukarya, Bapak Subarjo dan Ibu, Keluarga Bapak Mulyono, Keluarga Bapak Suhud, keluarga Bapak Panji S. Sunarya, Keluarga Bapak Suhadi Sarmadi, Keluarga Bambang Isriyanto, Keluarga Bapak Dr Raman R. Saman, Keluarga Bapak Farman, Keluarga Besar Bapak Saleh Basarah, Keluarga besar Bapak Wiek Wibadswa, Keluarga Besar Bapak Alex

Papadimitriou, Keluarga besar Bapak Yudi Waluyo Hadi. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada saudara saudara saya Garibaldi & Ima Garibaldi, Grasiani, almarhum Legowo Sumali, Gayatri, Garina & Yorgo, serta keponakan keponakan: Geriyanti & Dimas, Gemala, Grahani, Glen & Mira, Garini, Gemala, Galini, Gianisa.

Ucapan terima kasih dan hormat yang sangat tinggi saya sampaikan pada Ibu saya Garsemi Soeria Danoe Ningrat Sujatmiko dan almarhum bapak saya Sujatmiko, semoga keduanya diberkati oleh Allah SWT. Demikian juga para leluhur saya semoga mendapat tempat di sisi Allah SWT. Akhirnya saya bersyukur dan berterima kasih yang tak terhingga pada dari Allah SWT yang memberi kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Semoga ilmu pengetahuan saya bermanfaat bagi masyarakat.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA: Iwan Gardono Sujatmiko

BAPAK: (Alm.) Marsekal Madya TNI (Purn.) Sujatmiko

IBU: Garsemi Soeria Danoe Ningrat Sujatmiko

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR: Bandung, 21 Maret 1956

PENDIDIKAN:

- Ph.D. Sociology, Harvard University, 1992 (*The Destruction of The Indonesian Communist Party (PKI): A Comparative Analysis of East Java and Bali*). (Specialization: Political Sociology)
- Drs. (Sosiologi) Jurusan Sosiologi FISIP-UI, 1982 (Skripsi: "Analisis Kemiskinan dengan Pendekatan Sistem: Suatu Pengkajian Teoretis dengan Sebuah Sketsa di dukuh Margosantoso, Jawa Timur).
- SMAN 4 Jalan Batu, Jakarta
- SMPN 1 Jalan Cikini, Jakarta
- SDN Jalan Besuki, Jakarta
- TK Jalan Ungaran, Jogjakarta

PEKERJAAN:

- Dosen Jurusan Sosiologi FISIP-UI: 1984-sekarang
- Ketua Jurusan Sosiologi (S-1) FISIP-UI: 1992-1998
- Ketua Laboratorium Sosiologi: 1999-2000
- Koordinator Pengembangan Penelitian FISIP-UI: 1999-2000
- Ketua Jurusan/Departemen Sosiologi FISIP-UI: 2001- 2004

MATA KULIAH:

- Sosiologi Politik (S1, S2)
- Stratifikasi Sosial (S1)

- Kesenjangan dan Eksklusi Sosial (S1)
- Southeast Asian Societies (S1)
- Metode Penelitian Kuantitatif (S2, S3)
- Seminar Teori Sosiologi (S3)
- Konstruksi Teori (S3)

ASOSIASI PROFESI:

- Ikatan Sosiologi Indonesia
- Asia-Pacific Sociological Association
- International Sociological Association/ISA (Research Committee: RC 01: Armed Forces and Conflict Resolution; RC 18: Political Sociology; RC 22: Sociology of Religion)
- International Political Science Association/IPSA (Research Groups/RC 45: Capitalism, Socialism, and Democracy).

KEGIATAN KEMAHASISWAAN:

- Wakil Ketua Angkatan 76 FIS UI (1978)
- Wakil Ketua Ikatan Keluarga Sosiologi (1979)
- Ketua Umum Senat Mahasiswa FIS UI (1979-1980)

PENELITIAN UTAMA:

1. 1993: Penyusunan Strategi Program Penelitian Hibah Bersaing Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Ditjen Dikti, Depdikbud dan FISIP-UI. (Anggota Tim).
2. 1994: Pembuatan Indikator Keluarga Sejahtera, ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia) dan BKKBN. (Anggota Tim).
3. 1994-95: Studi Evaluasi Sosialisasi Program Inpres Desa Tertinggal di 27 Propinsi: Bappenas dan Jurusan Sosiologi, FISIP-UI. (Ketua Tim).
4. 1995: Penelitian Sistem Pemilu, LabSosio-FISIP-UI. (Ketua Tim).
5. 1995: Penelitian 50 Tahun Integrasi Masyarakat Indonesia di 10 Propinsi: LabSosio FISIP-UI. (Ketua Tim).
6. 1995 Penelitian Stratifikasi dan Mobilitas Sosial di DKI Jakarta, LabSosio FISIP-UI. (Ketua Tim).

7. 1997: Penelitian Kerusakan Tasikmalaya, Ditjen Kebudayaan Depdikbud, Fakultas Psikologi UI dan Jurusan Sosiologi FISIP-UI. (Ketua Tim).
8. 1997-98: Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya (RUPSB) tahun 1994-2005 di DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta dengan LabSosio FISIP-UI. (Anggota Tim).
9. 1998: Model dan Indikator Integrasi Sosial, RUT, Kantor Menristek.(Ketua Tim).
10. 1999: Kerusakan Sosial di 7 Provinsi. YIIS, LabSosio, AIPI. (Anggota Tim).
11. 1999-2000: Polri yang Mandiri, Profesional dan Akuntabel. Mabes Polri dan Tim Wacana (Mahasiswa Pasca Sarjana) UI. (Konsultan).
12. 1999-2000: *Evaluation of Community Development Program*, Newmont Nusa Tenggara, LabSosio FISIP-UI. (Anggota Tim).
13. 2000: Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta dan Lembaga Pengabdian Masyarakat UI. (Anggota Tim).
14. 2002: Pengaduan Publik ke DPR-RI. Jakarta. SetJend DPR RI dan UNDP.
15. 2002: Konflik Sosial di Batam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Poso, dan Ambon. DepParsenibud (Anggota Tim).
16. 2004: "Peace and Development in Aceh" UNDP & LabSosio FISIP-UI, Desember 2004. (Anggota Tim).
17. 2004 "Grand Strategi Polri 2025" LPEM-FE-UI dan Mabes Polri Juni. (Kordinator Skenario Planning).
18. 2006: "Pengembangan Model Akuntabilitas Demokrasi" Bappenas dan LabSosio FISIP-UI, Januari. (Ketua Tim)
19. 2006: "Naskah Akademik Bidang Sosial Budaya" Ditjen Kesbangpol depdagri dan LabSosio FISIP-UI, Desember. (Ketua Tim)
20. 2007: "Analisis Sosial Politik Pasca Pemberlakuan Undang Undang partai Politik 2007" Ditjen Kesbangpol Depdagri dan LabSosio FISIP-UI, Desember. (Ketua Tim)
21. 2008: "Visi Indonesia 2030" bidang Sosial Budaya, "Yayasan Indonesia Forum," Jakarta, 2008. (Anggota Tim).

22. 2009: "Amandemen Konstitusi dan Inklusi Sosial", Direktorat Riset dan Pengabdian UI. (Ketua Tim)
23. 2009: "Decentralization and Social Inclusion" kerjasama LabSosio dengan Asia Research Center, Murdoch University. (Ketua Tim)
24. 2010-2011: "Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan", BP Migas, Jakarta. (Ketua Tim).
25. 2012: "Analisis Sosial Politik Jembatan Selat Sunda" Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI (Ketua Tim).
26. 2013-2014: Studi Keterbukaan Informasi Publik." Kemenkominfo (Ketua Tim).

Visiting Scholar: International Institute for Sociology of Law, Onati, Spain, September 2010.

Reviewer: Ethnic and Racial Studies

Kegiatan Riset, Seminar, Publikasi Ilmiah dan Media (Pilihan)

A. Kemiskinan & Korupsi

1. "Analisis Kemiskinan dengan Pendekatan Sistem: Suatu Pengkajian Teoretis dengan Sebuah Sketsa di dukuh Margosantoso, Jawa Timur, Skripsi FIS-UI, 1982.
2. Pembuatan Indikator Keluarga Sejahtera, ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia) dan BKKBN. (Anggota Tim), 1994.
3. Pusat Pengkajian Gerakan Non-Blok U.I. "Program Pengentasan Kemiskinan di Negara-Negara Non-Blok," Depok, 19 Desember 1996.
4. "Review RUU tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN," Pembicara, Fraksi Karya Pembangunan, DPR-RI, Jakarta, 16 Maret 1999.
5. "Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Makalah: "Masyarakat Aktif, Transparansi dan Korupsi," Seminar: Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, Pasca Sarjana Administrasi FISIP-UI: seminar Nasional: Depok, 12 Juni 2001.
6. "Performance Review" dan Pengembangan Diskursus TGTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi): "Hypercorruption" dan Strategi Pemberantasan Korupsi" Jakarta 25 Juli 2001.

7. Publikasi: "Masyarakat Aktif, Transparansi dan Korupsi," *Jurnal Inovasi*, No.1, 2001.
8. "Hypercorruption" dan Strategi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 2, No.1, 2002.
9. "Masyarakat dan Anti Korupsi," Seminar Departemen Kriminologi FISIP UI, Depok 9 Desember 2009.
10. Ceramah, "Kemiskinan dan KKN," FISIP Universitas Udayana, Bali 28 Juni 2010.
11. "Biaya Sosial Korupsi", Narasumber "Peluang dan Tantangan Penerapan Biaya Sosial Korupsi: Suatu Upaya Memiskinkan Koruptor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 25 Juli, 2012.
12. "Korupsi dan Gerakan Sosial," *Kompas*, 25 Agustus 2012.
13. "18 Memo untuk Mengatasi Kemiskinan (2011-2013)" untuk Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan Dr. H.S. Dillon.
14. "Uji UU Keuangan Negara (UU No.17/2003) dan UU MPR, DPR, DPRD, DPD (UU NO.27/2009) terhadap UUD 1945" Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi untuk kasus Badan Anggaran, 21 Agustus 2013.
15. "Reformasi, Kekuasaan, dan Korupsi", *Kompas*, 23 Agustus, 2013.
16. "Peran Pemimpin dalam Pengurangan Kemiskinan," Ceramah dalam Lokakarya Penanggulangan Kemiskinan. Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Penganggulangan Kemiskinan, 8 November 2013.

B. Stratifikasi, Konstitusi, Keadilan

1. "Stratifikasi dan Mobilitas Sosial: Suatu Studi Awal Masyarakat Jakarta," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, No.1 1996.
2. "Kontrol Konstitusional dalam Pembangunan Jangka Panjang," *Kompas* 28 April, 1997.
3. "Amandemen Bagi Poros Bawah," *Forum Keadilan*, 19 Maret 2000.
4. "Populisme dan Multistrara dalam Konstitusi Indonesia Baru" Seminar Seruan Depok untuk Solusi Multikrisis: "Populisme dan Multistrata dalam Konstitusi Indonesia." FIB, Depok, 15 September 2001.
5. "Konstitusi yang Emansipatoris," *Kompas*, 13 September, 2002.

6. "Konstitusi dan Transformasi Sosial. *Suara Pembaruan*, 18 September 2004.
7. Kuliah Umum Pasca Sarjana Sosiologi, Dep. Sosiologi FISIP–UI, "Sosiologi Transformatif dan Masyarakat Indonesia: Sebuah Gagasan Awal", Depok, 6 Oktober 2005.
8. Simposium "Hari Pancasila": Keadilan Sosial dalam Masyarakat Indonesia," Depok, 31 Mei, 2006.
9. Workshop "Demokrasi dan Keadilan Sosial," KPUD Riau: "Keadilan Sosial Vertikal dan Demokrasi," Pekanbaru 19 Desember, 2006.
10. "Keadilan dalam Masyarakat Indonesia" dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Jakarta FISIP-UI, P2D, Brighten Institute, Kelompok Tempo Media, 2006.
11. "Revolusi Sosial yang Gagal", *Kompas*, 30 September 2009.
12. "Pancasila yang Transformatif", *Kompas*, 8 Juni 2011.
13. "Konflik dan Keadilan Sosial," *Kompas*, 2 Maret 2012.
14. "Sosiologi Transformatif; Konstitusi dan Representasi Sosial," Review Sosiologis tentang Indonesia 2012, Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), 4 Juli 2012, Bogor.
15. "Constitution And Social Transformation: Constitutional Amendments In The Post-Suharto Indonesia." The 23rd IVR World Congress of Legal and Social Philosophy, Krakow, Poland. August 4, 2007.
16. "Social Exclusion and State Policy: The Indonesian Experience." The 38th World Congress of the International Institute of Sociology, Budapest, Hungary, 26 -30 June 2008.
17. "Social Inclusion and Social Transformation", The 3rd Annual Conference of Human Development and Capability Association, New Delhi, India, September 12, 2008.

C. Reformasi dan Demokrasi

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI): "Demokrasi Sosial dan Masyarakat Indonesia," Seminar "Demokrasi di Indonesia" LIPI, Jakarta 24 Mei 1993.
2. " Reformasi Sistem Pemilu Indonesia, *Kompas* 12 Oktober 1995.

3. "Pendistribusian Sistem Proporsional: Demokratisasi Sistem Perwakilan Indonesia," *Masyarakat*, No.6 1995.
4. "Reformasi Sistem Pemilu Indonesia," *Jurnal Masyarakat*, No.7 1996.
5. DPP Golkar: "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat," Diskusi Tim GBHN Golkar 1998, Pemilu dalam Perspektif Demokrasi Pancasila, Jakarta, 29 Mei 1996.
6. Kontrol Konstitusional dalam PJP II, *Kompas* 28 April 1997.
7. Demokratisasi Indonesia 1997-2002. *Suara Pembaruan* 28 Juli 1997
8. Pusat Pengkajian Gerakan Non-Blok U.I. "Pemimpin Politik di Negara Berkembang Menuju Abad 21: Dari *Governor* menjadi *Administrator*?" Seminar Masalah-Masalah Gerakan Non-Blok, Depok, 18 Februari 1998.
9. "Pemegang Kedaulatan yang Sesungguhnya," *Kompas*, 23 Februari 1998.
10. Universitas Indonesia, "Reformasi Politik dan Kedaulatan Rakyat," Seminar Penjelajahan Tracee II UI, 10 Maret 1998.
11. "Sistem Pemilu 1999," *Suara Pembaharuan*, 21 September 1998.
12. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, "Reformasi Politik dan Sosial di Indonesia," HUT ke-22 Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 31 Oktober 1998.
13. "Demokrasi, Amandemen, dan Dwifungsi ABRI," *Suara Pembaharuan*, 11 November 1998.
14. "Dampak Politik Reformasi IMF" (dengan Fritz Simanjuntak), *Visi*, vol.1 No. 2 1998.
15. Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR-RI: Diskusi Respons DPR RI Terhadap Tuntutan Reformasi Kemasyarakatan Indonesia, Jakarta 13 Mei 1998.
16. "Ratih: Milisi, Aparat dan Laskar," *Suara Pembaharuan*, 28 Desember 1998.
17. "Birokrat, Parpol, dan Pemilu," *Suara Pembaharuan*, 12 Januari 1999.
18. "Wakil, "Recall" dan Kampanye Pemilu," *Suara Pembaharuan*, 25 Januari 1999.
19. "Suharto setelah Reformasi" dalam Kisah Perjuangan Reformasi. Selo Soemardjan (ed.) 1999.

20. Legitimasi Pemerintahan Habibie (bersama Fritz Simanjuntak). dalam Kisah *Perjuangan Reformasi*. Selo Soemardjan (ed.) 1999.
21. "Dampak Reformasi terhadap ABRI" (dengan Arie S. Soesilo.) dalam *Kisah Perjuangan Reformasi*, Selo Soemardjan (ed)1999.
22. "Reformasi Setengah Hati," *Forum Keadilan*, 14 Mei 2000.
23. "Demokrasi dan Pers", *Forum Keadilan*, 18 Juni 2000
24. "Masa Depan Pemerintah dan Peran Militer," Seminar Pemerintahan Sipil di Era Reformasi, Jakarta, 17 Juni 2000.
25. "Blok Politik di Era Reformasi," *Suara Pembaharuan*, 27 Juli 2000.
26. "Akuntabilitas Parlemen," *Kompas*, 18 Agustus 2000.
27. "Militer, Rakyat dan Demokrasi," *Suara Pembaharuan*, 21 Agustus 2000.
28. "Sang Menteri," *Forum Keadilan*, 1 Oktober 2000.
29. Pelatihan Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Pertahanan: "Manajemen Krisis," Jakarta, 6 September 2001.
30. Pelatihan Kodam Brawijaya: "Manajemen Krisis", Surabaya, 12 September 2001.
31. Ceramah Seskoal-TNI AL : "Rekayasa Sosial dan Perencanaan Sosial" Jakarta 20 November 2001.
32. "Kesiapan Masyarakat dalam Reformasi Pemilu" CETRO ,2001.
33. "Demokrasi Pasca Pemilu," *Masyarakat* no 11. 2002.
34. "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," *Suara Pembaruan*, 14 Mei 2003.
35. "Pemilihan Presiden dan Politik Uang," "Partai Lokal dan Tokoh Adat dalam Pemilu 2004," Diselenggarakan oleh "Parliamentary Support and Public Participation", UNDP dan Partnership, Jayapura 22 Mei 2003.
36. "Statistik: Untuk Dikritik dan Mengkritik". *Kompas*, 15 November 2003
37. Suksesi Sosial, Malfungsi Negara dan Disintegrasi Sosial: Kasus Ambon: *Jurnal Masyarakat*. No. 13, 2004
38. "Sumber-Sumber Demokrasi: Suatu Perbandingan Teoretik. *Masyarakat*. 2005
39. Otonomi Daerah dan Demokratisasi, *Kompas*, 3 April 2006.

40. Diskusi Mabes TNI "Penindakan Kerusuhan dalam Tertib Sosial": "Reformasi dan Konflik Sosial," Jakarta 6 Juli, 2007.
41. "Analisis Sosial Politik Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Partai Politik 2007," Depok, 17 April 2008.
42. "Indonesia's Political Transformation: Democracy in the Post-Suharto Indonesia." The 6th International Conference on Politics and International Affairs, Athens, Greece : 23-26 June 2008.
43. "Perkembangan Sosial Budaya Strategis 2008-2018," Seminar Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, 16 September 2008.
44. "Good Governance Parpol dan UU Parpol": Menggagas Pemilu Bermakna, LabSosio FISIP-UI, Depok, 18 September 2008.
45. Realita Demokratisasi," *Media Indonesia*, 23 Maret 2009.
46. "Globalization and Democratization: The Indonesian Case." The 9th Millenium CISS Conference. International Studies Association. Potsdam, Germany, June, 13-16, 2009.
47. "Sukarno, Pancasila, dan Transformasi Indonesia," *Media Indonesia*, 30 Juni, 2010.
48. "Perang Asimetrik, Pertahanan Negara, dan Konflik Sosial," Seminar KemenkoPolhukam "Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Deteksi Dini dan Pencegahan Terhadap Hakekat Ancaman Pertahanan Negara", Jakarta 23 November 2010.
49. "Pancasila yang Transformatif," *Kompas*, 8 Juni 2011.
50. "Parpol dan Pembangunan Bangsa," *Kompas*, 12 Desember 2014.

D. Integrasi dan Konflik

1. "Aktor dan Sistem dalam Revolusi Iran, *Persepsi*, No.2 1990.
2. "Dampak Krisis Moneter dan Konflik Sosial," Mabes TNI-KasSospol, Jakarta, 15 Januari 1998.
3. "Integrasi Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke-21" dalam *Yudhagama*. No.56, Th XIX, Oktober 1998.
4. Balitbang Departemen Agama: "Integrasi Antar Kelompok Agama: Kerukunan Pasif dan Aktif," Jakarta, 3 November 1998.

5. "Kerusuhan Sosial di Tasikmalaya" (bersama Sukiati et.al.) *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 1998.
6. "Simpul-Simpul Integrasi di Timika, Irian Jaya" dalam *Visi*, vol.1 No. 4 1998.
7. "Integrasi dan Disintegrasi Bangsa-Bangsa di Dunia: Pelajaran Bagi Bangsa Indonesia," Simposium Kepedulian UI terhadap Integrasi Bangsa, Depok, 21 April 1999.
8. Masyarakat Sejarawan Indonesia, Seminar PraKipnas (Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional), "Kehancuran PKI Tahun 1965-66," Puspitek, Serpong, 8 September 1999.
9. "Aksi Global Gus Dur," *Forum Keadilan*, 20 Februari 2000.
10. "Rekonsiliasi," *Forum Keadilan*, 29 Oktober 2000.
11. "Ketidakadilan di Aceh," *Forum Keadilan*, 17 Desember 2000.
12. "Kehancuran PKI tahun 1965-66", *Lembaran Sejarah*, No.9, 2000.
13. "Empat Kelompok Separatisme," *Tempo*, 4 Februari 2001.
14. Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI tentang Kerukunan Nasional: "Pokok-Pokok Pikiran tentang Kerusuhan Sosial," Jakarta, 15 Maret 2001.
15. "Kerusuhan dan Konflik," *Suara Pembaharuan*, 2 April 2001.
16. Gus Dur, Separatisme dan Kerusuhan," *Suara Pembaharuan*, 25 Juni 2001.
17. "Opsi untuk Papua," *Forum Keadilan*, 2 Juli 2001.
18. Konferensi Nasional Pertama Kesejahteraan Sosial: "Konflik Sosial dan Solusinya: Pengalaman Indonesia," Jakarta, 24 Juli 2001.
19. "G.30.S dan PKI." *Suara Pembaruan*. 30 September 2003.
20. "Sumpah Pemuda dan Nasionalisme." *Suara Pembaruan*, 28 Oktober 2003.
21. "Konflik RI dengan GAM." *Suara Pembaruan*, 21 Januari 2004.
22. "Perdamaian dan Pembangunan di Aceh," Seminar Nasional Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, UNDP-Bappenas, Jakarta, 1 November, 2004.
23. "Masyarakat dan Pembangunan Bangsa." *Suara Pembaruan*, 24 Januari 2005.
24. "Transformasi Konflik di Aceh." *Suara Pembaruan*, 15 Juli 2005.
25. "Kerusuhan Sosial: Suatu pemetaan Teoretik." *Visi*. 2005.

26. "Conflict Transformation in Aceh". Asia Pacific Sociological Association. Bangkok, December 16-18 2005.
27. "From Peace Making to Peace Building: The Case of Aceh." The XVth World Congress of Sociology (International Sociological Association), Durban, South Africa. July 25, 2006.
28. Ceramah Pembekalan Angkatan 44 PTIK: "Peran Polri dalam Mengantisipasi Konflik Sosial," Jakarta, 3 Juni 2006.
29. Workshop "Manajemen Konflik," KPUD Riau: "Transformasi dan Manajemen Konflik di Aceh". Pekanbaru 28 Desember 2006.
30. "Communal Conflict and State Failure: The Case of Ambon, Indonesia" 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security, Istanbul, Turkey, June 14-16,2007.
31. "Budi Utomo dan Kebangkitan Nasional" *Suara Pembaruan* 14 Juni 2007.
32. "Primordial dan Nasionalisme" *Suara Pembaruan* 16 Februari 2007.
33. "Communal Conflict, State Failure, and Peace Building: The Case of Ambon, Indonesia," Giuseppe Caforio, et.al (Eds.). *Armed Forces and Conflict Resolution: Sociological Perspective. Contributions to Conflict Management, Peace Economics, and Development*, Volume 7: 349-363. Bingley, UK, 2008.
34. "Revolusi Sosial yang Gagal" *Kompas*, 30 September 2009.

E. Sosiologi dan Transformasi Sosial

1. "The Sacred Relation: A Relational Approach to the Study of Religion", *Masyarakat*, No.1 1989.
2. Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI): "Keluarga Kompetitif, Negara Intervensif dan Masyarakat Adil," Seminar Nasional I Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), Bandung, 7 Desember 1992.
3. *Studi 50 Tahun Integrasi Masyarakat Indonesia*. Iwan Gardono, M. Iqbal Jayadi, Arie Susilo, Dody Prayogo. Jakarta: LabSosio, 1995.
4. Peran Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan Masyarakat," Dies Natalis Universitas Terbuka, Pondok Cabe, 28 Agustus 1996.
5. "Masyarakat, Polling dan Telepon," Diskusi Panel "Polling dan Media Massa," Jakarta, 12 November 1996.

6. LabSosio FISIP-UI: "Review Masyarakat Indonesia 1996" (bersama Arie Soesilo, Dody Prayogo, Iqbal Jayadi), LabSosio, Januari 1997.
7. *Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya (RUPSB) tahun 1994-2005 di DKI Jakarta*. Paulus Wirutomo, Soelaeman Soemardi, Iwan Gardono Sujatmiko. Jakarta: Pemda DKI Jakarta dengan LabSosio FISIP-UI, 1998.
8. Center for Research on Intergroup Relation and Conflict Resolution, A Joint Center of FISIP-UI and Ohio University: "Policy Research" (Pelatihan Metodologi), Depok, 1 Juli 2001.
9. Seminar "Center for Civil Society Studies": "Indikator-Indikator Civil Society." Depok 30 Oktober 2001.
10. Pelatihan Bappeda DKI Jakarta: "Indikator-Indikator RUPSB", Jakarta, 25 Oktober 2001.
11. *Pengaduan Publik ke DPR RI: Laporan Bulan Maret*. Paulus Wirutomo, Soelaeman Soemardi, Iwan Gardono Sujatmiko, Francisia Seda, Indera Ratna Irawati. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002.
12. Seminar Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI): "Sketsa Perkembangan Teori dan Metodologi Riset di Indonesia, Bogor, 29 Agustus, 2002.
13. "Elite and Society in Indonesian Crisis," KNAW International Conference "Indonesian in Transition," 24 Agustus, 2003, Depok.
14. Diskusi "Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia" (LCKI): "Mencegah dan Menanggulangi Tindak Terorisme Bunuh Diri dari Sudut Pandang Sosial Kemasyarakatan," Jakarta, 12 April 2006.
15. "International Accommodation of The Rise of China: The Case of Australia" (Discusant).The 20th International Political Science Association (IPSA) World Congress Congress Fukuoka, Japan, July 11, 2006
16. "The Supernatural Sociation: A Simmelian Approach to the Sociology of Religion." The XVIth World Congress of Sociology, (International Sociological Association), Durban, South Africa. July 29; 2006,
17. "Bencana Sosial di Nanggroe Darussalam", Semiloka Pengembangan Sistem Informasi untuk Antisipasi Bencana Sosial, LIPI, Jakarta 12 Desember 2007.

18. "Rekonstruksi Sosial Budaya Menuju Indonesia 2030", Yayasan Indonesia Forum, 11 April 2008.
19. "Another World is Possible and Desirable." World Congress of Political Science. International Political Science Association, Santiago, Chile: July 12-16, 2009.
20. (Bersama Rochman Achwan) "Contesting Mainstream Sociology and Developing Alternative Public Sociologies in Indonesia" in Michael Burawoy et al (Eds). *Facing an Equal World: Challenges for Global Sociology. Volume Two: Asia*. A Joint Publication of the Institute of Sociology, Academia Sinica, Council of National Associations of the International Sociological Association, Academi Sinica, Taipei, 2010: 244-263.
21. "Statistik Sosial" Workshop Prisma School of Public Policy, Jakarta, 22 Agustus 2011.
22. "Perkembangan Regional dan Dampak Sosial Budaya bagi Indonesia", Diskusi Lemhannas, Jakarta, 25 Februari 2013.
23. Analisis Sosial Politik Pengembangan "Kawasan Strategis & Infrastruktur Selat Sunda" (KSISS). Seminar & Forum Strategic Region and Sunda Strait Bridge Development , ITB, Bandung, 29 Juni 2013.